PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
Sebuah Telaah Kritis

Ahmad Royani
Manajemen Pendidikan Islam IAIN Jember
royanpuritanjung@gmail.com

Abd. Hamid
Manajemen Pendidikan Islam INZAH Genggong Probolinggo
abdulhamid198024@gmail.com

Mohamad Ahyar Ma'arif
Manajemen Pendidikan Islam INZAH Genggong Probolinggo
ahyarqotrun19@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Islam, sebelumnya hanya dipersepsi sebagai materi ajar, sekarang telah dipersepsi sebagai materi,sebagai institusi, sebagai kultur, dan sebagai system. Inilah yang sekarang tercermin dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah secara operasional mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka peneyebutan istilah "pendidikan islam" bisa mencakup empat persepsi: *pertama,* pendidikan islam dalam pengertian materi; *kedua,* pendidikan islam dalam pengertian institusi; *ketiga,* pendidikan islam dalam pengertian budaya dan nilai-nilai, dan *keempat,* pendidikan islam dalam pengertian pendidikan yang islami. Oleh karenanya dalam konteks perubahan zaman, perkembangan institusi pendidikan islam tidak sepenuhnya bisa menghindar dari perubahan, sebagiman pondok pesntren, lembaga-lembaga islam juga mneganut prinsip "*continuity and change*" atau dalam bahasa pesantrennya disebut" *al-muhaadhah alal qadim ash-shalih wal akhdzu bil jaded al-ashlah*", intitusi pendidikan islam akan terus melakukan perubahan dan adopsi inovasi tetapi tetap mmepertahankan tradisi yang baik dan bermanfaat.

Kata Kunci; *Problematika, Kebijakan Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah melecit secara kuantitas. Indonesia merupakan Negara yang paling banyak lembaga pendidiakn Islam dianding Negara lain. Eksistensi dari lembaga pendidikan Islam sendiri tidak terlepas dari visi besar lembaga islam tertua yakni pesantren dalam bertransformasi sesuia dengan tuntutan man.[1].Dalam perkembangannya pesantren telah "menyulap" dari kesan tradisional menjadi lembaga yang *bonafit* dan bahkan menjadi lembaga favorit bagi masyarakat.

Menurut Tafsir, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.[2] Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah.

Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup menusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. Seperti dalam surat Adz Dzariyat ayat 56 :

> *" Dan Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Ku".*

Tafsir menyatakan bahwa sebagian orang mengira ibadah itu terbatas pada menunaikan shalat, shaum pada bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, ibadah Haji, serta mengucapkan syahadat. Tetapi sebenarnya ibadah itu mencakup semua amal, pikiran, dan perasaan yang dihadapkan (atau disandarkan) kepada Allah. Aspek ibadah merupakan kewajiban orang islam untuk mempelajarinya agar ia dapat mengamalkannya dengan cara yang benar.

Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental, dan sosial se-

---

[1] Ahamd Royani, *Eksistensi Pendidikan pesantren dalam Arus perubahan,* Jurnal Cendekia Vol 16 No 2 Tahun 2018, 375-395

[2] Ahmad Tafsir., *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam.,* PT. Remaja Rosdakarya., Bandung, 2001) 20

dangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak, yang kedua pengertian ini harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah (Hadist)

Abdul Halim Soebahar dalam bukunya Kebijakan Pendidikan Islam mengatakan bahwa Pendidikan islam adalah pendidikan islami. Karakteristik yang snagat menonjol dari pendidikan islam adalah prinsip pokoknya, yaitu "prinsip tauhid",yakni prinsip dimana segalanya berasal dan berakhir. Prinsip ini telah menjadi pemandu pengembangan teori dan pelaksanaan pendidikan islam secara formal, informal, dan nonformal. Bahkan prinsip ini pula yang telah memandu persepsi umat tentang pendidikan islam, sehingga pendidikan islam dipersepsi secara lebih komprehensif.[3]

Transformasi penting pesantren dan madrasah paling enomenal dipastikan terjadi di Indonesia. Gejala penting jelas adalah bahwa pesantren dan madrasah dalam beberapa dasawarsa kian terlibat dalam pendidikan. Proses tranformasi itu sebagai mana sudah banyak diketahui bermula pada 1970 an. Ketika Menteri Agama Mukti Ali memperkenalkan perubahan kurikulum madrasah yang kurang dari 100 persen agama menjadi 70 persen umum dan 30 persen agama. Perubahan ini ak]hirnya ditetetapkan dalam UU Sisdiknas 1989. [4]

Pendidikan islam, sebelumnya hanya dipersepsi sebagai materi ajar, sekarang telah dipersepsi sebagai materi,sebagai institusi, sebagai kultur, dan sebagai system. Inilah yang sekarang tercermin dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang *system pendidikan nasional* dan peraturan pemerintah secara operasional mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka peneyebutan istilah "pendidikan islam" bisa mencakup empat persepsi: *pertama,*pendidikan islam dalam pengertian materi; *kedua,* pendidikan islam dalam pengertian institusi; *ketiga,* pendidikan islam dalam pengertian budaya dna nilai-nilai, dan *keempat,* pendidikan islam da-

---

[3] Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam; dari Ordonasi sampai UU sisdiknas,* (Depok; Rajawali Press, 2013) 1

[4] Asrori S. Kartini, *Etos Studi Kaum Santri* (bandung: PT Mizan Pustaka, 2009) Xvi

lam pengertian pendidikan yang islami.[5]

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tidak sedikit pesantren menerapkan pendidikan dengan system madrasah, dan kini berjalan dengan perkembangan social yang ada. sejak dasawarsa 1970 an sejummlah pesantren membuka sekolah-sekolah umum (SD, SLPT, SMU dan SMK) hal ini karena adanya kesadaran lingkungan pengasuh pondok pesantren.

Dalam pandangan Karel A. Steenbrink menyebut modernisasi yang dilakukan di pondok pesantren menyebutnya " menolak sambil mengikuti" sistem pendidikan madrasah yang mengalami modernisasi itu telah mengadopsi sisi-sisi positif warisan pendidikan kolonial Beland, terutama aspek metodologis dan materi umumyang di intengrasikan dengan pendidikan agaama Islam, yang merupakan ciri khas pendidikan surau dan pesantren. [6]

Satu bukti survivinya pesantren paling tidak bisa dilihat dari perkembangan jumlahnya yang dari tahun ketahun terus meningkat. Sartono Kartodirojo (1984) menyebutkan bahwa, kurun waktu tahun 1860 M diperkirakan jumlah pesantren lebih dari 300 buah. Sebagaimana JA Van Der Chijs dalam *Report of 1831 on Indigionous Education* melaporkan bahwa keberadaan pesantren telah tersebar ke berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan catatan Kementerian Agama pada tahun 2010 berjumlah 25.785 dan pada 2011 berjumlah 27.218.[7] Dan jumlah ini terus mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Akhirnya harus kita akui, bahwa pesantren dan madrasah mempunyai andil yang besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Pesantren memiliki multidimensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dibidang ideology, social, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

Namun dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan intitusi tersebut , yakni pesantren dan madrasah masih perlu adanya deregulasi dibidang

---

[5] Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam; dari Ordonasi sampai UU sisdiknas,* (Depok; Rajawali Press, 2013) 2

[6] Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen.* Jakarta: LP3ES, 1994.

[7] Surya Darma Ali, *Epistemologi Kajian Islam Indonesia Memperluas Horizon Kajian Islam, menjawab Tantangan perubahan* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 15.

pendidikan, baik melalui amandemen undang-undang sisdiknas maupun reformasi kebijakan yang sudah tidak relevan, mapun lainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sumber kajian yang ada dalam penelitian ini lebih mengarah pada dokumentasi tentang pendidikan Islam. Selain itu juga informasi kekinian tentang pendidikan Islam merupakan sumber primer juga dalam penelitian ini. Sumber dari kajian buku, Kebijakan Pendidikan Islam seperti UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, peraturan pemerintah dan juga peraturan Meneteri Agama dijadikan pijakan dasar dalam kajian ini. Dinatara buku yang dijadika rujukan dalam kajian adalah 1)Buku Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, tentang *Kebijakan Pendidikan Islam; dari Ordonasi sampai UU sisdiknas,*yang diterbitkan oleh Rajawali Press pada tahun 2013, 2)Surya Darma Ali, *Epistemologi Kajian Islam Indonesia Memperluas Horizon Kajian Islam, menjawab Tantangan perubahan* yang diterbitkan UIN Maliki Press pada 2013. 3) Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011) 4) Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen.*yang diterbitkan LP3ES pada tahun1994) merupakan sumber penting dalam penulisan artikel ini.

PROBLEMATIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Perkembangan pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam di dunia timur umumnya secara sederhana bisa terdiri dari tiga jenis, Madrasah, *khuttab,* dan Masjid. Sampai abad ke 19 ketiga lembaga pendidikan tradisional Islam ini relatif bertahan. Tetapi semejak perempatan terakhir abad ke 19 gelombang pembaharuan dan modernisasi yang kian kencang mengalami perubahan yang tidak bisa dimundurkan lagi dalam eksistensi lembaga pendidikan Islam tradisonal.

Dalam konteks Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidiakn yang berdiri tegak atas kemauan masyarakat. Jika kita lihat sejarah pesantren tidak terlepas dari pesebaran atau Islamisasi yang dilakukan oleh para *Wali Sanga* pada waktu itu. Para wali membentuk tempat tempat kecil yang dija-

dikan sebagai tempat belajar atau *ngaji* seperti *Langgar*, yang lambat laun tempat kecil atau yang baisa disenut *langgar* ini berkembang menjadi Masjid. Agus Sunyoto dalam bukunya atlas *Wali Sanga* menyebutkan bahwa dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambilalihan sistempendidikan lokal berciri Hindu-Budha dan Kapitayan seperti Dukuh, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan islam yang disebut Pondok pesantren yang tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena penyebar Islam yang merupakan guru-guru rohanu dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosio kultur-relegius yang dianut masyarakat Syiwa-Budhadengan nilai-nilai Islam. [8]

Abduraman Mas'ud juga mengatakan bahwa asal usul pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah Walisongo abad 15-16 di Jawa.[9] *Approach* dan *wisdom* walisanga agaknya terlembaga dalam esendi budaya dengan ideologis dan kesejarahanya. Kesinambungan ini tercermin dalam hubungan islosois antara *taqlid* dan *modeling* bagi masyarakat santri. Melalui konsep *modeling* keagunan Muhammad SAW serta charisma Walisanga, yang dipersoniikasikan oleh para auliya dan kyai telah terjunjung tinggi dari masa kemasa.

Secara padegogis pesantren lebih dikenal lembaga pendidikan Islam, lembaga didalamnya terdapat proses belajar mengajar ilmu agama Islam dan lembaga yang dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam. Dalam proses belajar mengajar dalam pesantren diajarkan bahwa Islam agama yang mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, apalagi skedar hubungan dengan Tuhannya, melainkan juga hubungan dengan manusia di dunia. Hal ini sangat mempengaruhi pada pribadi santrinya, bahkan juga berpengaruh pada pribadi alumninya stelah mereka terjun dimasyarakat.

Pendidikan pesantren dapat dikatakan sebagai modal sosial dan bahkan soko guru bagi perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Karena pendidikan pesantren yang berkembang sampai saat ini dengan berbagai modelnya senantiasa selaras dengan jiwa, semangat, dan kepribadian bangsa

---

[8] Sunyoto Agus. 2012. *Atlas Wali Songa.* (Bandung: Pustaka IIMaN.2012) 360

[9] Abdurahman Mas'ud, Dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah,* (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2002) 3

Indonesia yang mayoritas beragama Islam.[10]

Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam

Jika dilihat dari perkembangan kebijakan pendidikan Islam dengan keluarnya undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada bab VI jalur jenjang dan jenis pendidikan pada pasal 30 tentang pendidikan keagamaan[11] meberikan angin segar tentang eksistensi pendidikan islam jika dilihat dari undang-undang.

Pendidikan islam menurut penegrtian yang pertama, (pendidikan islam dalam penegrtian materi), maka yang dimaksud pendidikan islam adalah "materi pendidikan agama islam (PAI)" yang wajib diberikan semua jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, baik disekolah maupun di madrasah. Yang dimaksud *pendidikan agama islam* adalah materi kurikulum PAI yang diberikan pada setia jenis,jalur dan jenjang pendidikan, baik di sekolah (SD,SMP,SMA,SMK dan atau PTU)di amdrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas islam (MI,MTS,MA dan atau PTAI) dan di madrasah diniyah (*Ula, wustha, ulya* dan atau *ma'had Aly*), karena sesuai dengan penegasan undang-undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional bahwa PAI adalah isi kurikulum yang wajib di ajarkan disetia jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Perbedaan poko antara PAI disekolah dengan di amdrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama islam adalah sebagai berikut kalau disekolah,PAI merupakan mata pelajaran dalamkelompok mata pelajaran agama dan akahlak(dengan sub mata pelajaran atau unsur pokok keimanan, ibadah al-quran-hadist, akhlak, mu'amalah, syariah dan tarikh) dengan satu silabi, sedang dimadrasah diniyah PAI merupakan satu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak (terdiri dari Qur'an Hadist, fiqh, Aqidah Akhlaq, SKI dan Bahasa Arab) dan setiap mata pelajaran memiliki silabi tersendiri.[12]

Pendidikan islam menurut pengertian yang kedua, (pendidikan islam

---

[10] Sulton dan Khusnuridlo. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2006) 17

[11] Tim Permata Press, *Undang-Undang Sisdiknas dan PP No 32 tentang perubahan standar nasional pendidikan* (Jakarta: Permata Press, 2013) 17

[12] Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam; dari Ordonasi sampai UU sisdiknas,* (Depok; Rajawali Press, 2013) 2

dalam penegrtian institusi), maka yang dimaksud adalah institusi-institusi pendidikan islam seperti: pondok pesantren, madrasah diniyah, madrasah SKB 3 menteri atau sekolah umum berciri keislaman, dan sebagainya. Eksistensi ketiganya bisa dijelaskan sebagai berikut:[13]

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan islam pertama dan asli Indonesia yang disebut juga sebagai lembaga *taaqquh iddin*. Institusi ini disebut pondok pesantren karena memiliki minimal lima komponen utama, yakni : kiai, santri, musholah/ masjid, pengajian kitab-kitab islam klasik, dan pondok/ asrama.[14] Dalam perkembanganya dalam PMA Nomor 13 tahun 2014 dsalah satu komponen pendidikan islam ditambah adanya kegiatan keagaan.

Keberhasilan pondok pesantren menyatukan ajaran islam dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, telah menempatkan isntitusi ini sebgai sub-kultur. yang turut memberi corak bagi khazanah budaya Indonesia. Kini perkembangan pondok pesantren semakin variati, dari yang murni *salafi* , berkembang ke *khalafi* dan bahkan memadukan keduanya. Di pihak lain, system pendidikan barat yang diintrodusir belanda sejak pertengahan abad XIX, mengispirasi segolongan umat islam memperbaharui pendidikan pondok pesantren melalui akulturasi dengan system pendidikan barat dan sisitem madrasah dari timur tengah, sehingga akhirnya muncul madrasah yang kemudian dikenal sebagai madrasah diniyah sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* secara klasikal.

Namun demikian, berkembanganya bentuk institusi pendidikan islam seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, dan madrasah sebagai sekolah berciri khas agama islam dan sekolah keislaman itu selain menunjukan keragaman visi-misi perjuangan, sekaligus menunjukan belum adanya *grand design* system kelembagaan pendidikan islam. Karena itu, srekontruksi kelembgaan sangat agar muncul ghirah yang bisa mneginisiasi format kelembgaan pendidikan islam yang mampu mengatur dan mensinteskan ketiga bentuk kelembagaan itu dalam sebuah system kelembagaan yang

---

[13] Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam; dari Ordonasi sampai UU sisdiknas,* 3

[14] Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

integral,sistemik dan holistic serta mampu menjelma sebagai "*magnet school*", yakni lembaga yang mampu menyedot potensi masyarakat karena reputasi kelembagaannya yang menyajikan layanan pendidikan berkualitas baik.

Wujud kelembagaan yang beberapa tahun sebelumnya diimpikan sekarang mulai terwujud dan eksis. Beberapa contoh dapat dikemukaakan, antara lain: untuk pendidikan dasar muncul SDI Al-Hikmah di Surabaya, SD Islam Anak Sholeh di malang, dan SLTP Plus Darus Sholah di jember. Untuk pendidikan menengah muncul SMA BPPT Darul Ulum di Jombang, SMA Madania daparung Bogor, dan MAN Insan Cendekia di serpong dan Gorontalo. Selanjutnya pada jenjang pendidikan tinggi muncul UIN Syahida di Jakarta, UIN Suka di Yogyakarta, UIN Maliki di Malang, dan Ma'had 'Ali di Situbondo. Berkembangnya institusi pendidikan islam tersebut jelas sebagai hasil dari proses rekontruksi kelembagaan pendidikan islam yang lebih menjanjikan.

Pendidikan islam menurut penegrtian yang ketiga, (pendidikan islam dalam pengertian kultur dan nilai-nilai),maka yang dimaksud adalah budaya atau kultur atau niali-niali keislaman yang tumbuh dan berkembang dan berpengaruh terhadap iklim pendidikan islam, citra pendidikan islam, dan *performance* insititusi pendidikan islam. Kultur pendidikan islam selama ini kurang tergarap secara baik dan professional, sehingga terjadi kesenjangan begitu jauh antara idealitas ajaran islam yang menekankan kebersihan dan citra kelembagaan pendidikan islam yang kerap disebut"kumuh", ada kesenjangan antara cita dan fakta dan sebaginya.

Yang terakhir, pendidikan islam menurut penegrtian keempat (pendidikan islam dalam penegrtian pendidikan yang islami), maka yang dimaksud adalah system pendidikan yang islami. Pendidikan islam, sebagaimana pendidikan lainnya, memiliki komponen-komponen utama ,seperti: dasar, tujuan, prinsip, metode, evaluasi dan sebagainya. Konstruksi komponen-komponen utama tersebut, menurut pengertian yang keempat, selalu mengacu pada ajaran normati (al-quran dan Al-hadist) dna terapannya dalam pendidikan.

Dengan demikian, kedepan, inovasi dan pengembangan pendidikan islam harus selalu dilakukan upaya *research and development* bisa diawali dengan asumsi bahwa pendidikan dalam dimensinya yang luas adalah proses

pemberdayaan manusia menurut *weltanschaung* (pandnagan hidup) tertentu. Islam jelas merupakan suatu *weltanschauung* yang berpijak di atas landasan wahyu dan menempatkan '*aql* pada posisi yang terhormat.

Oleh karena itu, misi pendidikan islam sangatlah mulia dan strategis, dan jika kita ingin menatap masa depan pendidikan islam yang mampu memmainkan peran strategis dan diperhitungkan agar menjadi pilihan, maka *research and development* harus selalu dilakukan. Dengan begitu pendidikan islma diharapkan dapat berperan lebih artikulati dimasa depan. Yang harus disadari, bahw asecara kualitati lembaga-lembaga pendidikan islam yang sekarang ini muncul serta dinilai "terkemuka" (*out of standing*), masih jauh dari tuntutan ideal. Karena, memang dalam bahasa penegembangan pendidikan berlaku adagium: "*start form the beginning to the end, and end for the beginning*".

Problem Mendasar dalam Kebijakan Pendidikan Islam

a. Sumberdaya Manusia

Perlu diketahui bersama problem yang muncul dalam lembaga pendidkan Islam yang paling mendasar adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya mansia dalam lembaga pendidikan pesantren kebanyakan masih menghandalkan keluarga sendiri. Problem akademik seperti persyaratan gelar juga menjadi hambatan serius dalam mempersiapkan SDM di lembaga pendidikan Islam

Berdasar perundang-undangan yang ada maka peranan pendidikan Islam, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, baik dalam struktur kurikulum maupun kelembagaan, baik dalam rumusan tujuan pendidikan nasional maupun suasana keagamaan yang ada dan terus berkembang positif sangatlah besar. Tetapi benarkah demikian kenyataanya ? karena banyak yang berpendapat, bahwa pendidikan Islam dalam kehidupan sekarang, dan bahkan juga kecenderungan ke depan, menurun peranan dan kualitasnya dibanding dengan masa-masa sebelumnya.

b. Problem dikotomi

Problem ini sebenarnya sudah muncul pada abad pertengahan lalu. Banyak beranggapan banwa antara ilmu agama dan umum merupakan dua kesatuan yang tidak bisa satukan. Begitu juga dalam perkembangan keil-

muan dan kelembagaan pesantren di Indonesia. Dalam proses perkembanganya pesantren awalnya masih malu-malu untuk bisa mengintegrasikan antara lembaga pendidikan islam dengan umum.

Tidak heran jika peneliti Karel A. Steenbrink menyebut modernisasi yang dilakukan di pondok pesantren menyebutnya " menolak sambil mengikuti" sistem pendidikan madrasah yang mengalami modernisasi itu telah mengadopsi sisi-sisi positif warisan pendidikan kolonial Beland, terutama aspek metodologis dan materi umumyang di intengrasikan dengan pendidikan agaama Islam, yang merupakan ciri khas pendidikan surau dan pesantren. [15]

Sistem madrasah, awalnya dibentuk dalam rangka konvergensi kelembagaan pendidikan Islam dan pendidikan umum. Namun dalam perkembangannya, orientasi sistem madrasah bergeser kepenguasaan ilmu-ilmu umum sebagai tujuan minor (sekunder), kendati pengalaman ilmu-ilmu agama tetap merupakan sasaran mayor (*primer*)-nya. Wacana mengenai pergeseran orientasi system madrasah ini menjadi actual, karena dipandang sebagai kelanjutan "konflik" dualisme pendidikan antara ilmu-ilmu "agama" dengan ilmu-ilmu "dunia" yang mengakibatkan disintegrasi pendidikan islam. Selain itu, krisis system kelembagaan pendidikan islam juga dipandang sebagai warisan colonial, suatu perpanjangan dari gerakan anti islam yang dilancarkan orang-orang belanda.[16] Karena itu, bergesernya orientasi sistem madrasah dipandang sebagai gejala deislamisasi, sekaligus kemenangan ilmu-ilmu dunia dan epistemology sekuler. Sedang sistem sekolah islam, menunjukkan pergeseran orientasi yang lebih ekstrim lagi, dengan penguasaan ilmu-ilmu sebagai tujuan institusional primer (*mayor*), sementara ilmu-ilmu agama hanya menjadi sasaran sekunder atau minornya. Penjungkir balikan orientasi system kelembagaan pendidikan islam ini, merupakan "pukulan telak" yang perlu diperhatikan kembali efek positif-negatifnya oleh pemikir dan praktisi pendidikan islam.

c. Problem politik pendidikan

Jika diibaratkan dengan benda, maka antara dunia pendidikan dan poli-

---

[15] Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen.* Jakarta: LP3ES, 1994.

[16] Jay, Robert, *Relegius And Politics In Rural Java* (New Haven; Yale University Press, 1963)

tik, baik dalam bentuk politik praktis maupun politik secara teoritis secara gamblang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena politik itu sendiri yang dapat melahirkan sebuah kebijakan. Maju atau mundurnya sebuah pendidikan dalam suatu Negara, begitu juga sebaliknya, *output* pendidikan yang berhasil dalam mencetak generasi penerus bangsa yang jujur, amanah dan dapat dipercaya, maka akan melahirkan pelaku-pelaku politik atau politisi yang juga berkualitas, sehingga imbasnya adalah tidak aka ada lagi yang namanya korupsi, kolusi maupun nipotisme yang saat ini meraja lela di Negeri ini.

Dengan demikian, relasi pendidikan dengan kebijakan politik dapat dikatakan sebagai sebuah relasi yang sama-sama mempunyai imbas pada kedua pihak, baik imbas dalam artian yang positif ataupun dalam bentuk imbas yang negative.

Tentunya jika bincang lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari politik pendidikan yang ada di Indonesia. Kita ketehaui bersama lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga yang berdiri kokoh dibawah Kementerian Agama.

d. Problem manajemen

Ibarat industry, lembaga pendidikan islam berusaha mengelola santri sebagai input untuk pendidikan menjadi manusia terdidik sebagai output dari proses pendidikan tuntutan manajerial yang lebih bagus.[17]

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu SDM menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan sehingga disadari bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada abad millenium ini. Manajemen Pendidikan Pesantren adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga Pendidikan Pesantren yg melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkan mencapai tujuan Pendidikan Pesantren secara efektif dan efisien." Jadi, manajemen pesantren merupakan bagian dari pendidikan Islam sehingga dapat manajemen pesantren sejalan dengan manajemen pendidikan Islam.

[17] Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009) 19

Pesantren merupakan produk sejarah yang telah berdialog dengan zamannya masing-masing yang memiliki karakteristik berlainan baik yang menyangkut sosio-politik, sosio-kultural, sosio-ekonomi maupun sosio-religius. Antara pesantren dan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat desa telah terjalin interaksi yang harmonis, bahkan keterlibatan mereka cukup besar dalam mendirikan pesantren. pesantren tampaknya masih mengandalkan manajemen "ikhlas", tanpa mulai melangkah menerapkan "manajemen profesional" yang biasanya dikembangkan dilembaga-lembaga pendidikan maju. Keduanya bisa dipadukan menjadi sebuah sintesa "Manajemen ikhlas dan profesional". Manajemen profesional yang lebih menghargai penempatan personel pada *job discription* sesuai profesinya, tetapi juga harus diimbangi dengan tata kerja yang didasarkan atas keyakinan bahwa bekerja berdasarkan profesi itu merupakan menifestasi ibadah kepada Allah.

Abdul Halim Soebahara juga menyebutkan mengenai problem mendasar dalam lembaga pendidikan Islan antara lain:[18] (1) Pendidikan Islam tidak mampu mencetak Ulama' berbobot, sementara ulama-ulama senior sebagai produk pendidikan Islam lama sudah banyak yang meninggal, (2) PAI pada jalur sekolah umum hanya sebatas 2 jam per minggu, sementara mata pelajaran lainnya dibiarkan terpisah dengan mata palajaran PAI, disamping masih kurang lancarnya budaya dialogis antara guru produk pendidikan Islam dan produk jenis pendidikan lain, (3) metode yang diterapkan dalam PBM pendidikan Islam masih sangat kognitif, menghafal dan kurang menekankan pada proses penumbuhan kemampuan berfikir kritis dan kreatif, padahal dengan kemajuan informasi boleh jadi bahwa tingkat kemampuan rata-rata peserta didik meningkat pesat, (4) mayoritas peserta didik pada lembaga pendidikan Islam berasal dari pedesaan yang minus dan bermental agraris, bahkan banyak diantara mereka sekolah secara terpaksa setelah gagal pada pilihan utama. Dengan kata lain, lembaga pendidikan Islam kurang mampu merekrut calon-calon peserta didik yang kualitasnya unggul, dan (5) secara keseluruhan, pendidikan Islam belum begitu *nyambung* dengan sistem pendidikan nasional, karena antara pendidikan Islam dan pendidikan umum berkembang keterpisahan yang mengakibatkan pendidikan nasional di Indonesia masih berwarna dikhotomik dan dualistik.

[18] Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)

Pendidikan Pesantren yang diharapkan

Dalam konteks perubahan zaman, perkembangan institusi pendidikan islam tidak sepenuhnya bisa menghindar dari perubahan, sebagiman pondok pesntren, lembaga-lembaga islam juga mneganut prinsip "*continuity and change*" atau dalam bahasa pesantrennya disebut " *al-muhaadhah alal qadim ash-shalih wal akhdzu bil jaded al-ashlah*" , intitusi pendidikan islam akan terus melakukan perubahan dan adopsi inovasi tetapi tetap mmepertahankan tradisi yang baik dan bermanfaat.

Dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan islam paling tidak ada beberapa hal yang harus tetapdiperthankan oleh lembaga pendidikan Isla (pondok Pesantren/madrasah)

Pertama dimensi kultur, dalam konteks ini watak mandiri merupakan ciri kultural yang harus dipertahankan , meskipun harus dijaga agar tidak berkembang kearah pengucilan diri. Watak kesederhaan dalam diri santri harus tetap dipertahankan, karena sangat diperlukan masyrakat yang memerlukan pemupukan modal pembangunan, dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Kedua dimensi edukatif, pada dimensi edukati ini antara laidapat terlihat pada output pendidikan. Paling tidak di dimesi kedua ini ada tiga output ysng menjadi target pesantren, 1) r*elegius skillful people* yang akan menjadi tenaga tangguh terampilsekaligus meiliki iman yang tangguh dan utuh sehingga relegisu menjadi sikap dan perilaku yang akan mengisi kebutuhan SDM dalam berbagai pembangunan. 2) *Relegius community Leader* yang akan menjadi penggerak yang dinamis didalam proses transormasi sosio kultur. 3) *Religius Intellektual* yang mempunyai integritas kukuh serta cakap melakukan analisa dan concern terhadap masalah social. *Ketiga Dimensi Sosial,* dalam hal ini pesantren merupakan lembaga pusat kegiatan belajar masyrakat, yang berfungsi sebagai laboratorium social.[19]

Pendidikan dalam Islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai atau ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempur-

[19] Abdurrahmad Mas'ud, Dkk., *Dinamika Pendidikajn Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)63

naannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi/akidah Islam.

Secara pasti, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan SDM yang berkepribadian Islami, dalam arti, cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan. Jadi, pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.

Dalam kerangka ini, diperlukan monitoring yang intensif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah (negara), terhadap perilaku peserta didik, sejauh mana mereka terikat dengan konsepsi-konsepsi Islam berkenaan dengan kehidupan dan nilai-nilainya. Rangkaian selanjutnya adalah tahap merealisasikannya sehingga dibutuhkan program pendidikan dan kurikulum yang selaras, serasi, dan berkesinambungan dengan tujuan di atas.

KESIMPULAN

Posisi strategis pondok pesantren dan madrasah dalam sistim pendidikan nasional itu juga memberikan peranan yang penting dalam pelaksanaan sistim pendidikan nasional, yaitu : *Pertama* peranan instrumental. Upaya pendidikan secara nasional, tak pelak lagi memerlukan sarana-sarana sebagai media untuk mengejawantahkan tujuan-tujuannya. Sarana-sarana itu, selain dibentuk secara formal seperti halnya gedung sekolah, juga dibentuk secara informal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada umumnya merupkan kreasi murni para kyai-ulama dalam usaha menciptakan sarana pendidikan. Dalam tataran inilah, peranan pondok pesantren sebagai alat atau instrumen pendidikan nasional.

Kedua Peranan Keagamaan. Pendidikan pondok pesantren pada hakikatnya tumbuh dan berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi agama. Lembaga ini dikembangkan untuk mengefektifkan usaha penyiaran dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Dalam pelaksanaanya, pendidikan pondok pesantren melakukan proses pembinaan pengetahuan, sikap dan kecakapan yang menyangkut segi keagamaan. Tujuan intinya adalah mengusahakan

terbentuknya manusia berbudi luhur (al-akhlaqul kariamah) dengan pengalaman keagamaan yang konsisten (istiqomah). Pendidikan Nasional sendiri bertujuan, untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq mulia. Untuk kepentingan ini pendidikan agama dikembangkan secara terpadu, baik melalui sekolah umum maupun madrasah.

Ketiga Peranan Memobilisasi Masyarakat. Dalam kenyataannya, usaha-usaha pendidikan nasional secara formal belum mampu menampung seluruh aktifitas pendidikan masyarakat Indonesia, di samping karena ada sebagian masyarakat yang kurang kesadarannya akan pentingnya pendidikan (sekolah), juga karena memang sarananya masih sangat terbatas, terutama di pedesaan. Bagi sebagian masyarakat masih terdapat kecenderungan yang memberikan kepercayaan pendidikan putra-putrinya hanya kepada pondok pesantren.

Keempat Peranan Pembinaan Mental dan Ketrampilan. Dalam sistim pendidikan Nasional, tujuannya adalah menciptakan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan di pondok pesantren diselenggarakan tidak hanya pada pendidikan keagamaan semata, melainkan juga dikembangkan pembinaan mental dan sikap para santri untuk hidup mandiri, meningkatkan keterampilan dan berjiwa entrepreneurship. Karena di pondok pesantren dikembangkan juga unit usaha atau pembinaan yang diselenggarakan dalam memenuhi tuntutan zaman dimana mereka, para santri, setelah lulus dan keluar pondok pesantren memiliki sesuatu keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan secara mandiri sebagai bekal hidupnya.

DATAR PUSTAKA

Asrori S. Kartini, *Etos Studi Kaum Santri* (bandung: PT Mizan Pustaka, 2009)

Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam; dari Ordonasi sampai UU sisdiknas,* (Depok; Rajawali Press, 2013)

Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)

Abdurahman Mas'ud, Dkk., Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2002)

Abdurrahmad Mas'ud, Dkk., *Dinamika Pendidikajn Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Abuddin Nata, M.A., *Filsafat Pendidikan Islam,* Cet. I, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997)

Ahmad Hanafi, M.A., *Pengantar Filsafat Islam*, Cet. IV, (Bulan Bintang, Jakarta, 1990)

Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974)

Ahmad Tafsir., *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam.,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Azra. Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002)

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).

Hitami, Munzir. *Menggagas Kembali Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Infinite Press, 2004)

Horikoshi, Hiroko, *Kiai dan perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987).

Jay, Robert, *Relegius And Politics In Rural Java* (New Haven; Yale UniversitPress, 1963)

Nur Uhbiyati., *Ilmu Pendidikan Islam*., (Bandung; CV. Pustaka Setia. 1998)

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1994)

Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

Sulton dan Khusnuridlo. *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006)

Sunyoto Agus. 2012. *Atlas Wali Songa.* (Bandung: Pustaka IIMaN.2012)

Royani, Ahamd , *Eksistensi Pendidikan pesantren dalam Arus perubahan,* Jurnal Cendekia Vol 16 No 2 Tahun 2018, 375-395

Surya Darma Ali, *Epistemologi Kajian Islam Indonesia Memperluas Horizon Kajian Islam, menjawab Tantangan perubahan* (Malang: UIN Maliki Press, 2013)

Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2002)

Tim Permata Press, Undang-Undang Sisdiknas dan PP No 32 tentang perubahan standar nasional pendidikan (Jakarta: Permata Press, 2013)

Zuhairini. Dra, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam,* Cet.II, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995.)